



## Tata Ruang Pesisir Bantul dalam Perspektif Keistimewaan DIY

Dwinanta Nugroho<sup>1</sup>, Hani Subagio<sup>2</sup>, Hari Rachmadi<sup>3</sup>, Ajeng Tri Kadesti<sup>4</sup>,  
Laksmi Garneta Kintawangi<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Universitas Gunung Kidul,

<sup>2</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA,

<sup>4,5</sup>Universitas Gadjah Mada

E-mail: hanisubagio@upnyk.ac.id

Diterima : 4 Oktober 2023

Direvisi : 14 November 2023

Dipublikasikan : 30 November 2023

### Abstrak

Penelitian ini menginvestigasi perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul, yang dikenal dengan keistimewaannya dalam aspek geografis, budaya, dan sosio-ekonomi. Kabupaten Bantul menghadapi sejumlah tantangan, termasuk abrasi pantai yang serius, perubahan iklim, dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi solusi holistik yang dapat memadukan mitigasi abrasi pantai, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan pelestarian warisan budaya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data geospasial, analisis kerentanan abrasi, wawancara dengan pemangku kepentingan lokal, dan penggunaan sistem informasi geografis (SIG). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan abrasi pantai dapat diintegrasikan dengan strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang lebih luas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan tata ruang pesisir telah membantu dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Implikasi dari penelitian ini adalah pengembangan rencana tata ruang pesisir yang berkelanjutan yang memperhitungkan aspek fisik, sosial, dan budaya. Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Kabupaten Bantul dan wilayah sejenis di seluruh dunia yang menghadapi tantangan serupa.

**Kata kunci:** Perencanaan Tata Ruang Pesisir, Abrasi Pantai, Nilai Budaya, Pariwisata, dan Keistimewaan Yogyakarta

### Abstract

*This research investigates the coastal spatial planning of Bantul Regency, which is known for its features in geographical, cultural and socio-economic aspects. Bantul Regency faces a number of challenges, including serious coastal erosion, climate change, and the preservation of local cultural values. This research aims to identify holistic solutions that can combine coastal erosion mitigation, adaptation to climate change, and cultural heritage preservation in coastal area management. This research involves collecting geospatial data, abrasion susceptibility analysis, interviews with local stakeholders, and the use of geographic information systems (GIS). The research results show that handling coastal abrasion can be integrated with broader adaptation strategies to climate change. In addition, community*



*involvement in decision making and implementation of coastal spatial planning policies has helped maintain the sustainability of the local environment and culture. The implication of this research is the development of sustainable coastal spatial plans that take into account physical, social and cultural aspects. The results of this research can be a guide for local governments, environmental management institutions and other stakeholders in maintaining the sustainability of the coastal areas of Bantul Regency and similar areas throughout the world that face similar challenges.*

**Keywords:** *Coastal Spatial Planning, Beach Abrasion, Cultural Values, Tourism, and Specialties of Yogyakarta.*

## **Pendahuluan**

Tata ruang pesisir Kabupaten Bantul memiliki karakteristik geografis dan sosio-ekonomi yang membedakannya dari wilayah-wilayah lain di Indonesia. Terletak di bagian selatan Pulau Jawa, Kabupaten Bantul memiliki garis pantai yang panjang dan beragam, menawarkan potensi yang besar dalam hal sumber daya alam, pertanian, perikanan, dan sektor pariwisata. Sebagai bagian dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Bantul memiliki status keistimewaan yang menambah kompleksitas dalam perencanaan tata ruangnya. Keunikan ini mencakup aspek-aspek budaya, sejarah, dan adat istiadat yang mendalam yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat setempat.

Namun, keindahan dan kekayaan Kabupaten Bantul ini juga disertai oleh serangkaian tantangan serius yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di wilayah pesisir. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah abrasi pantai. Sebagai wilayah pesisir yang terbuka ke Samudera Hindia, Kabupaten Bantul sangat rentan terhadap abrasi pantai. Faktor-faktor seperti peningkatan tingkat laut, aktivitas manusia di pesisir, dan perubahan iklim telah memperburuk kerentanan wilayah ini terhadap erosi pantai yang mengancam pemukiman, lahan pertanian, dan infrastruktur penting di pesisir.

Selain itu, perubahan iklim yang telah terjadi dan diperkirakan akan terus berlanjut juga menjadi perhatian utama dalam perencanaan tata ruang pesisir. Peningkatan suhu, perubahan pola hujan, dan kenaikan permukaan air laut mengancam keseimbangan lingkungan pesisir dan ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang pesisir harus mampu mengakomodasi adaptasi terhadap perubahan iklim yang berkelanjutan.

Selain tantangan fisik yang dihadapi oleh wilayah pesisir Kabupaten Bantul, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat setempat juga menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan mengenai perencanaan tata ruang. Identitas budaya yang kuat dan tradisi yang kaya telah membentuk cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungannya selama berabad-abad. Pemahaman akan pentingnya pelestarian warisan budaya ini telah menjadi faktor penting dalam perencanaan tata ruang pesisir yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan mengkaji perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul dengan fokus pada penanganan abrasi pantai, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir. Melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu pengetahuan geografi, lingkungan, dan sosial, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan solusi yang holistik dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Kabupaten Bantul.



## **Metode**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post konstruktivisme dengan metode yuridis sosiologis. Metode penelitian ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang tata ruang pesisir Yogyakarta yang berkeistimewaan dengan fokus pada aspek sosial dan konstruksi sosial dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pendekatan post konstruktivisme dipilih sebagai kerangka teoretis dalam penelitian ini karena mengakui kompleksitas dan dinamika dalam konstruksi sosial tentang tata ruang pesisir. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan sektor swasta, secara aktif berkontribusi dalam pembentukan tata ruang pesisir sebagai hasil dari interaksi sosial mereka. Pendekatan post konstruktivisme juga menekankan pentingnya pengetahuan lokal dan narasi yang beragam dalam pemahaman tentang wilayah pesisir.

Metode yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis peran hukum dan regulasi dalam pembentukan tata ruang pesisir, serta dampaknya terhadap masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya. Metode ini menggabungkan pendekatan yuridis (hukum) dengan analisis sosiologis untuk memahami interaksi antara hukum, norma sosial, dan tindakan sosial dalam konteks tata ruang pesisir. Data hukum dan peraturan yang relevan akan dianalisis secara kritis untuk memahami bagaimana mereka membentuk realitas sosial dan pengelolaan pesisir di Yogyakarta.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Fenomena Abrasi**

Wilayah pesisir adalah sebuah area yang sangat dinamis, di mana peralihan antara laut dan darat menciptakan perubahan geomorfologi yang signifikan. Salah satu fenomena geomorfologi yang menonjol adalah erosi, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti pasang surut laut, aktivitas manusia, dan angin. Di Provinsi DIY, khususnya di Kabupaten Bantul, kasus abrasi telah menjadi isu utama karena dampak negatifnya terhadap penggunaan lahan pesisir yang strategis.

Wilayah pesisir Bantul berjarak sekitar 12 mil dari garis pantai, dengan sebagian wilayah laut berada dalam yurisdiksi provinsi dan sebagian lagi menjadi tanggung jawab kabupaten/kota. Kasus abrasi dalam dekade terakhir ini mencakup penurunan garis pantai, kerusakan infrastruktur, dan hilangnya lahan berharga. Kabupaten Bantul, sebagai wilayah yang berdekatan dengan pantai, memiliki peran penting dalam mengendalikan penggunaan ruang di wilayah pesisir DIY. Pengelolaan yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan geomorfologi adalah prioritas untuk mengurangi dampak abrasi.

Kasus abrasi yang menonjol dalam dekade ini banyak terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Bantul, yang merupakan kabupaten yang memiliki fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dikawasan pesisir karena berdekatan dengan pantai.

Abrasi adalah proses geomorfologi yang memiliki dampak signifikan pada wilayah pesisir, termasuk wilayah pesisir Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses ini melibatkan erosi dan penurunan garis pantai sebagai akibat dari tindakan erosi oleh air laut, angin, dan faktor manusia. Kasus abrasi di wilayah ini menunjukkan perubahan ekstensif dalam struktur geomorfologi, mengancam lingkungan, dan memiliki implikasi serius terhadap aktivitas manusia dan keberlanjutan wilayah pesisir.



Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bantul adalah tingkat pasang surut air laut. Perubahan tingkat air laut secara periodik, seperti pasang surut harian dan musiman, menciptakan tekanan hidrostatik pada pantai. Pasang surut tinggi, terutama saat dikombinasikan dengan badai laut atau cuaca buruk, dapat menyebabkan erosi pantai yang signifikan. Hal ini mengakibatkan hilangnya pasir dan batu-batu karang yang sebelumnya melindungi pantai dari erosi.

Selain itu, faktor angin juga memiliki peran penting dalam proses abrasi. Angin dapat menciptakan gelombang yang kuat, yang merusak pantai dan menggerus material pantai. Angin juga dapat membawa pasir dan debu, yang dapat mengikis pantai dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk vegetasi pantai.

Peran aktivitas manusia dalam abrasi juga tidak bisa diabaikan. Pembangunan pesisir, seperti pelabuhan, pemukiman, dan infrastruktur pariwisata, sering kali mengganggu ekosistem alami pantai dan dapat mempercepat proses erosi. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir, seperti penambangan pasir, juga dapat merusak ekosistem pantai dan memperburuk abrasi.

Dampak kasus abrasi ini sangat serius, terutama terkait dengan hilangnya lahan, kerusakan infrastruktur, dan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang pesisir yang berkelanjutan dan upaya adaptasi menjadi penting dalam menghadapi abrasi ini. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang proses geomorfologi dan pengaruhnya, serta perencanaan kebijakan yang tepat untuk melindungi wilayah pesisir dan mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Bantul dan wilayah pesisir serupa di seluruh dunia.

Abrasi adalah proses geomorfologi yang memiliki dampak signifikan pada wilayah pesisir, termasuk wilayah pesisir Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Proses ini melibatkan erosi dan penurunan garis pantai sebagai akibat dari tindakan erosif oleh air laut, angin, dan faktor manusia (Zhang et al., 2019). Kasus abrasi di wilayah ini menunjukkan perubahan ekstensif dalam struktur geomorfologi, mengancam lingkungan, dan memiliki implikasi serius terhadap aktivitas manusia dan keberlanjutan wilayah pesisir (Saputra et al., 2021).

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Bantul adalah tingkat pasang surut air laut. Perubahan tingkat air laut secara periodik, seperti pasang surut harian dan musiman, menciptakan tekanan hidrostatik pada pantai (Kumar et al., 2020). Pasang surut tinggi, terutama saat dikombinasikan dengan badai laut atau cuaca buruk, dapat menyebabkan erosi pantai yang signifikan. Hal ini mengakibatkan hilangnya pasir dan batu-batu karang yang sebelumnya melindungi pantai dari erosi.

Selain itu, faktor angin juga memiliki peran penting dalam proses abrasi. Angin dapat menciptakan gelombang yang kuat, yang merusak pantai dan menggerus material pantai (Morton et al., 2014). Angin juga dapat membawa pasir dan debu, yang dapat mengikis pantai dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk vegetasi pantai.

Peran aktivitas manusia dalam abrasi juga tidak bisa diabaikan. Pembangunan pesisir, seperti pelabuhan, pemukiman, dan infrastruktur pariwisata, sering kali mengganggu ekosistem alami pantai dan dapat mempercepat proses erosi. Eksploitasi sumber daya alam di wilayah pesisir, seperti penambangan pasir, juga dapat merusak ekosistem pantai dan memperburuk abrasi (Chua et al., 2018).

Dampak kasus abrasi ini sangat serius, terutama terkait dengan hilangnya lahan, kerusakan infrastruktur, dan ancaman terhadap mata pencaharian masyarakat pesisir (Liu et al., 2017). Oleh karena itu, pengelolaan tata ruang pesisir yang berkelanjutan dan upaya adaptasi



menjadi penting dalam menghadapi abrasi ini. Ini mencakup pemahaman mendalam tentang proses geomorfologi dan pengaruhnya, serta perencanaan kebijakan yang tepat untuk melindungi wilayah pesisir dan mendukung keberlanjutan ekonomi dan lingkungan di Kabupaten Bantul dan wilayah pesisir serupa di seluruh dunia.

Saat ini, data kerusakan abrasi di pesisir Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggambarkan gambaran yang alarm bagi keberlanjutan wilayah pesisir. Berdasarkan survei dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan lembaga riset terkait, berikut adalah beberapa data kerusakan akibat abrasi di wilayah pesisir Bantul:

1. Penurunan Garis Pantai: sejumlah pantai di Bantul telah mengalami penurunan garis pantai sekitar beberapa m setiap tahunnya. Data pengukuran menunjukkan bahwa beberapa pantai utama seperti Pantai Parangtritis dan Pantai Depok mengalami penurunan garis pantai yang signifikan selama dekade terakhir. Sebagai contoh, Pantai Parangtritis telah kehilangan sekitar 20 m dari garis pantai aslinya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
2. Kerusakan Infrastruktur: kasus abrasi telah menyebabkan kerusakan infrastruktur penting di wilayah pesisir Bantul. Ini termasuk kerusakan terhadap jalan raya pesisir, pelabuhan, dan fasilitas pariwisata. Infrastruktur yang rusak telah menghambat mobilitas masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.
3. Hilangnya Lahan: abrasi juga telah menyebabkan hilangnya lahan berharga di wilayah pesisir. Lahan pertanian, pemukiman, dan areal wisata di sepanjang pesisir Bantul terancam oleh erosi pantai. Banyak petani dan penduduk setempat kehilangan sumber penghasilan mereka karena lahan mereka tergerus oleh air laut.
4. Ancaman Terhadap Ekosistem Pesisir: abrasi juga memiliki dampak serius pada ekosistem pesisir. Kerusakan pada hutan mangrove dan ekosistem terumbu karang telah menyebabkan penurunan biodiversitas dan mengancam kelangsungan hidup spesies yang ada di wilayah tersebut.
5. Kerugian Ekonomi: data ekonomi menunjukkan kerugian yang signifikan akibat abrasi. Sektor pariwisata, yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal, mengalami penurunan kunjungan wisatawan karena kerusakan pantai. Selain itu, biaya pemulihan infrastruktur dan upaya mitigasi abrasi juga menyebabkan beban finansial bagi pemerintah daerah.

Data kerusakan abrasi ini menyoroti urgensi perlunya tindakan penanggulangan dan mitigasi yang efektif untuk melindungi wilayah pesisir Bantul. Pengelolaan tata ruang pesisir yang berkelanjutan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan partisipasi aktif masyarakat lokal menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini.

### **Idealisasi Perencanaan Tata Ruang Pesisir**

Dalam perencanaan dan penggunaan lahan di wilayah pesisir, penting untuk mempertimbangkan garis sempadan pantai sebagai salah satu elemen penting dalam pengamanan dan pengelolaan wilayah ini. Garis sempadan pantai adalah zona daratan sepanjang tepi pantai yang lebarnya disesuaikan dengan karakteristik fisik pantai itu sendiri, dengan standar minimal 100 m dari titik pasang tertinggi ke arah darat (Kementerian PUPR, 2019). Konsep ini merupakan bagian integral dari strategi perlindungan pesisir yang bertujuan untuk mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan morfologi pesisir, seperti abrasi dan gelombang pasang tinggi.

Pendekatan konsep morfologi pesisir yang diusulkan menjadi salah satu alternatif yang relevan, terutama dalam konteks kawasan pesisir yang memiliki luas wilayah yang cukup besar. Dalam kerangka konsep ini, penggunaan lahan di zona buffer sepanjang 100 m dari garis



pasang tertinggi menjadi fokus utama, dan zona ini dibatasi oleh jalan lingkungan. Selain itu, pemanfaatan vegetasi keras sebagai penghalang alami untuk melindungi pantai dari dampak gelombang tinggi dan bahaya tsunami menjadi bagian integral dari strategi ini.

Pengembangan bentuk pemukiman di kawasan pesisir juga memperhatikan aspek perlindungan. Penggunaan sistem grid dalam perencanaan pemukiman bertujuan untuk mengurangi potensi turbulensi air laut yang dapat terjadi akibat pengaruh pesisir. Selain itu, penambahan vegetasi sejenis di sepanjang jalan grid juga menjadi pertimbangan untuk melindungi pemukiman yang ada dari potensi dampak negatif lingkungan pesisir.

Pendekatan ini memiliki relevansi yang signifikan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, yang melibatkan kombinasi antara teknik morfologi pesisir, pemanfaatan lahan yang bijaksana, dan pelestarian vegetasi pesisir sebagai elemen penting dalam mitigasi risiko abrasi dan dampak buruk lainnya pada wilayah pesisir (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul, 2020).

Usaha pengamanan pantai yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya gelombang pasang tinggi (rob), abrasi, menjamin adanya fasilitas sosial dan umum di sekitar pantai, menjaga pantai dari pencemaran, serta pendangkalan muara sungai, maka direkomendasikan bentuk dasar sebagai konsep morfologi pesisir adalah sebagaimana gambar berikut:



Konsep tersebut menjadi alternatif terutama untuk kawasan pesisir yang mempunyai luasan cukup besar. Secara garis besar, untuk melindungi kawasan sempadan pantai maka ditetapkan *buffer* sepanjang 100 m dari garis pasang tertinggi dengan dibatasi oleh jalan lingkungan. Selanjutnya keberadaan tanaman keras adalah sebagai *barrier* penahan adanya kemungkinan gelombang tinggi maupun tsunami. Adapun untuk bentuk pemukiman dibangun dengan sistem grid yang berfungsi untuk mengurangi turbulensi air laut yang dimungkinkan terjadi. Beberapa vegetasi sejenis dapat juga ditambahkan disepanjang grid jalan untuk melindungi bentuk pemukiman yang ada.

Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir, konsep morfologi pesisir dan penentuan garis sempadan pantai memegang peranan vital dalam menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta perlindungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Garis sempadan pantai yang didefinisikan sesuai dengan kondisi fisik pantai merupakan langkah yang tepat dalam upaya menghadapi ancaman abrasi, gelombang pasang tinggi (rob), dan perubahan lingkungan di wilayah pesisir (Hadi et al., 2018).



Konsep morfologi pesisir yang mencakup penggunaan vegetasi keras sebagai penghalang alami dan sistem grid untuk pemukiman merupakan strategi yang relevan dalam mengelola risiko abrasi di wilayah pesisir. Vegetasi keras seperti mangrove dan tanaman pantai lainnya memiliki kemampuan alami untuk meredam dampak gelombang dan menjaga keseimbangan ekosistem pesisir (Adger et al., 2020). Selain itu, pemukiman yang dirancang dengan sistem grid dapat mengurangi dampak turbulensi air laut yang sering terjadi akibat bentuk pemukiman yang padat di sepanjang pantai.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan tata ruang pesisir yang berkelanjutan, yang bertujuan untuk menjaga ekosistem pesisir, mengurangi risiko bencana alam, dan memastikan kesejahteraan masyarakat pesisir (Wibowo et al., 2019). Dalam kerangka ini, keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pesisir menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan keberlanjutan ini (Satria et al., 2021).

Sebagai bagian dari strategi perlindungan pesisir yang holistik, penting bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk secara aktif memantau kondisi pesisir, mengidentifikasi perubahan yang terjadi, dan menyesuaikan rencana pengelolaan sesuai dengan perubahan tersebut. Konservasi dan restorasi ekosistem pesisir juga menjadi bagian integral dalam upaya melindungi garis pantai dan ekosistem pesisir yang rentan (Nurdin et al., 2017).

Dalam konteks Kabupaten Bantul dan wilayah pesisir serupa, penerapan konsep morfologi pesisir yang berkelanjutan dan pemanfaatan lahan yang bijaksana di sepanjang garis sempadan pantai menjadi langkah yang sangat relevan dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir yang berharga ini.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan wilayah pesisir Kabupaten Bantul dan kawasan pesisir serupa, beberapa langkah konkrit perlu dilakukan. Pertama, diperlukan pemantauan rutin terhadap kondisi garis pantai dan perubahan morfologi pesisir. Data-data ini akan menjadi dasar untuk menilai dampak dari strategi konsep morfologi pesisir yang diimplementasikan dan mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang mungkin diperlukan seiring berjalannya waktu (Yulianto et al., 2020).

Kedua, penguatan perlindungan vegetasi pantai, termasuk program restorasi dan konservasi hutan mangrove, sangat penting. Vegetasi pantai memiliki peran kunci dalam mengurangi dampak abrasi dan gelombang tinggi. Investasi dalam pemeliharaan dan pelestarian ekosistem pesisir juga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang melalui peningkatan produktivitas perikanan dan pariwisata (Suherman et al., 2018).

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir harus ditingkatkan. Masyarakat memiliki pengetahuan yang berharga tentang karakteristik pesisir dan potensi risiko. Dengan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan, akan lebih memungkinkan untuk mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal (Toscano et al., 2019).

Keempat, perlu ada perencanaan tata ruang pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan pedoman dan kebijakan yang mengarah pada pemanfaatan lahan yang bijaksana di sepanjang garis pantai, serta pengaturan dan pengawasan pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir (Simanjuntak et al., 2021).

Langkah-langkah ini harus diimplementasikan dengan cermat dan terkoordinasi oleh pemerintah daerah, lembaga terkait, serta melibatkan pihak swasta dan masyarakat sipil. Dengan pendekatan holistik yang mencakup perlindungan ekosistem, pengelolaan lahan yang

berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat, wilayah pesisir seperti Kabupaten Bantul dapat menghadapi tantangan abrasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Kondisi Empirik Terkait Tata Guna Lahan Pesisir**

Kondisi eksisting di lapangan, radius 100 m dari titik pasang tertinggi tersebut merupakan lahan *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) dan zona inti gumuk pasir barchan. Tahan *Sultanaat Grond* (SG) dan *Paku Alamanaat Grond* (PAG) di kawasan pesisir merupakan lahan yang difungsikan oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup dan masyarakat hanya memiliki hak guna lahan. Tumbuhnya beberapa bentuk permukiman yang terkesan tidak rapih dan tidak teratur ditambah dengan upaya pengendalian dan pengawasan yang tidak terintegrasi menjadi potensi permasalahan baru dimasa mendatang. Sementara fenomena gejala abrasi maupun banjir pasang semakin meningkat dengan intensitas dan luasan dampak yang makin melebar.

Pendekatan terhadap pemanfaatan lahan di wilayah pesisir Bantul perlu diarahkan ke arah yang lebih terencana dan berkelanjutan. Perencanaan tata ruang pesisir yang holistik dan terintegrasi harus mempertimbangkan potensi kerentanan terhadap abrasi serta dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Diperlukan upaya untuk mengintegrasikan hak guna lahan masyarakat dengan keberlanjutan lingkungan, termasuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lahan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Tindakan perlindungan garis pantai yang efektif juga harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan wilayah pesisir. Ini mencakup penggunaan teknik morfologi pesisir yang mencakup pemeliharaan vegetasi pantai, seperti tanaman keras yang mampu meredam abrasi dan gelombang tinggi. Selain itu, upaya restorasi hutan mangrove dan ekosistem pesisir yang rusak dapat membantu memperkuat ketahanan pesisir terhadap abrasi.

Dalam kerangka pengelolaan tata ruang pesisir yang lebih baik, penting juga untuk menggandeng semua pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta dan lembaga akademik. Kolaborasi yang kuat ini dapat memastikan bahwa solusi yang diusulkan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan juga harus diperkuat, sehingga mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap keberlanjutan wilayah pesisir yang mereka huni.

Sebagai wilayah pesisir yang terus menghadapi ancaman abrasi dan perubahan lingkungan, Kabupaten Bantul dan wilayah-wilayah serupa di seluruh dunia membutuhkan pendekatan pengelolaan yang terpadu, berbasis bukti, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Hanya dengan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, kita dapat menjaga keberlanjutan wilayah pesisir untuk generasi mendatang.

Analisis mendalam mengenai tata ruang pesisir Bantul menyoroti beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam pengelolaan wilayah pesisir yang lebih baik:

1. **Pengelolaan Hak Guna Lahan:** Pengelolaan lahan di zona pesisir yang melibatkan hak guna lahan masyarakat (seperti *Sultanaat Grond* dan *Paku Alamanaat Grond*) harus dilakukan secara bijaksana. Pemerintah daerah harus mengintegrasikan hak guna lahan ini dalam perencanaan tata ruang pesisir untuk menghindari pemukiman yang tidak teratur dan berlebihan di wilayah rentan abrasi.
2. **Dampak Perubahan Iklim:** Perubahan iklim, termasuk peningkatan tingkat laut, memperparah kerentanan wilayah pesisir terhadap abrasi. Oleh karena itu, perencanaan





- tata ruang pesisir harus mempertimbangkan skenario perubahan iklim dalam jangka panjang, termasuk peningkatan tingkat laut dan intensitas cuaca ekstrem.
3. Teknik Morfologi Pesisir: Penggunaan teknik morfologi pesisir, seperti pemeliharaan vegetasi pantai dan restorasi ekosistem pesisir, harus menjadi bagian integral dari strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pemeliharaan tanaman keras di sepanjang garis pantai dapat membantu melindungi pantai dari erosi dan dampak gelombang tinggi (Hadi et al., 2020).
  4. Peran Masyarakat: Partisipasi aktif masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan adalah kunci dalam pengelolaan wilayah pesisir yang berhasil. Masyarakat memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang karakteristik pesisir dan potensi risiko. Dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, akan lebih memungkinkan untuk mengidentifikasi solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
  5. Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan: Kolaborasi erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga akademik, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk mencapai pengelolaan tata ruang pesisir yang holistik. Kerja sama ini dapat memastikan bahwa solusi yang diusulkan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Dahuri et al., 2018).
  6. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Dalam menghadapi perubahan iklim dan ancaman abrasi yang terus meningkat, pemantauan berkelanjutan terhadap kondisi garis pantai dan dampak perubahan morfologi pesisir sangat penting. Data yang terkumpul harus digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan menilai efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah diambil.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, Kabupaten Bantul dan wilayah-wilayah pesisir serupa dapat mengembangkan strategi tata ruang pesisir yang berkelanjutan dan adaptif. Pentingnya menggabungkan ilmu pengetahuan, partisipasi masyarakat, dan kerja sama lintas sektor tidak dapat diabaikan dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir ini.

### **Pendekatan Filosofi Budaya**

Pendekatan filosofi budaya dalam perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul, DIY, atau dalam konteks umum perencanaan tata ruang pesisir, mengacu pada integrasi nilai-nilai budaya lokal dan tradisi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir. Pendekatan ini mengakui bahwa budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk cara manusia berinteraksi dengan lingkungannya dan dapat menjadi aset yang berharga dalam menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Berikut adalah beberapa aspek pendekatan filosofi budaya dalam perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul:

1. Menghormati Tradisi Lokal  
Pendekatan ini dimulai dengan penghormatan terhadap tradisi lokal dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat pesisir Bantul. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana masyarakat setempat telah mengelola wilayah pesisir selama berabad-abad, termasuk praktik pertanian, perikanan, dan pemukiman yang sesuai dengan lingkungan pesisir.
2. Penggunaan Lahan yang Terkait dengan Budaya  
Perencanaan tata ruang pesisir harus mempertimbangkan bagaimana masyarakat setempat menggunakan lahan berdasarkan budaya mereka. Ini bisa mencakup pemeliharaan lahan pertanian tradisional, pelestarian situs budaya, dan pengembangan tempat-tempat wisata budaya yang menghargai warisan lokal.
3. Konservasi Lingkungan Berdasarkan Kearifan Lokal



Pendekatan ini juga melibatkan konservasi lingkungan berdasarkan pengetahuan dan praktik lokal. Contohnya, masyarakat pesisir Bantul mungkin memiliki pemahaman tentang cara menjaga hutan mangrove dan ekosistem pesisir lainnya yang telah diterapkan secara turun-temurun.

4. Partisipasi Aktif Masyarakat

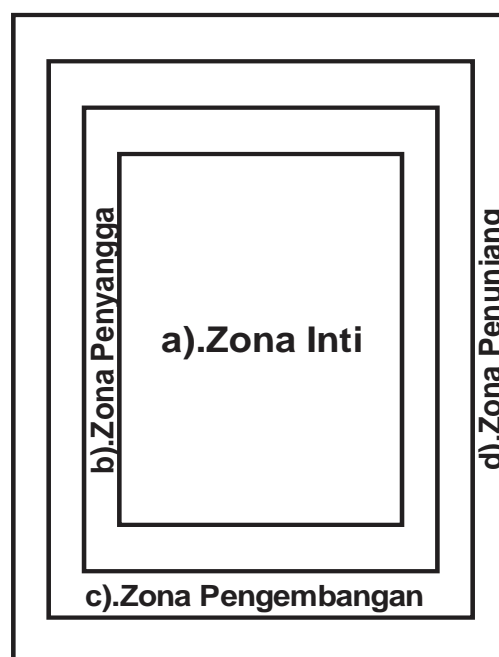
Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait tata ruang pesisir. Masyarakat setempat harus terlibat dalam merumuskan rencana dan kebijakan yang memengaruhi wilayah pesisir mereka, sehingga nilai-nilai budaya mereka dihormati dan dijaga.

5. Pemanfaatan Budaya untuk Pariwisata Berkelanjutan

Budaya lokal juga dapat menjadi sumber potensial pendapatan melalui pariwisata berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan pariwisata yang menghargai budaya lokal dan menguntungkan masyarakat setempat.

Pendekatan filosofi budaya dalam perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul dan wilayah pesisir lainnya mengakui pentingnya memadukan aspek budaya dengan aspek ekologi dan ekonomi. Ini bertujuan untuk menciptakan rencana pengelolaan yang lebih holistik dan berkelanjutan yang menjaga warisan budaya dan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan demikian, pendekatan ini menghargai dan memelihara identitas budaya lokal sambil mengatasi tantangan abrasi dan perubahan lingkungan yang dihadapi wilayah pesisir.

Dalam tinjauan filosofi budaya ini, keberadaan tradisi dan cagar budaya yang ada di kawasan Parangtritis-Parangkusumo menjadi perhatian utama dalam upaya pelestarian dan pengelolaannya. Tradisi *Pisungsung Jaladri*, adat labuhan maupun ritual bernuansa Budaya Jawa yang selama ini berlangsung harus terus terpelihara dan dikembangkan. Apapun untuk pelestarian benda cagar budaya kawasan Parangkusumo juga harus dilakukan penegasan sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Cagar Budaya, yaitu dengan penetapan zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan zona penunjang.





Dalam gambar tersebut dapat dijelaskan dalam zona inti, tersusun 3 (tiga) zona yang menjadi penguat dalam kawasan zona inti yang fungsinya saling berkaitan. Seperti zona penyangga, zona yang merupakan area dengan fungsi melindungi zona inti yang berkaitan dengan tindakan pelestarian dan aktivitas kegiatan masyarakat ini dalam pemanfaatan harus dilakukan pembinaan dengan tujuan untuk melestarikan zona inti yang berupa peningkatan pemeliharaan melalui perawatan disekitar lokasi zona inti, agar kondisi lahan tidak terjadi alih fungsi oleh kegiatan manusia. Kemudian dapat dilihat dari ilustrasi diatas terdapat juga zona pengembang yang mana zona ini merupakan kawasan yang secara langsung mendukung kegiatan dengan fungsi menyediakan pelayanan fasilitas yang berada di zona inti dengan tetap melakukan tindakan pemeliharaan terhadap objek yang berada pada zona inti agar tetap terjaga kelestariannya. Terakhir, zona penunjang merupakan area yang diperuntukkan bagi prasarana dan sarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan zona umum.

Menurut peraturan perundangan tersebut, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya didarat atau diair yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan kebudayaan melalui proses penetapan. Kondisi fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa penegakan disiplin untuk hal ini masih kurang, yaitu dengan merebaknya prostitusi terselubung, tempat-tempat karaoke dsb yang memerlukan pendekatan perencanaan lebih lanjut.

## **Kesimpulan**

Studi ini telah menginvestigasi perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul dengan mempertimbangkan faktor-faktor abrasi, dampak perubahan iklim, dan pendekatan filosofi budaya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Dari hasil penelitian, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik:

1. Kerentanan terhadap Abrasi  
Kabupaten Bantul memiliki kerentanan yang signifikan terhadap abrasi pantai, yang merupakan ancaman serius bagi pemukiman dan lahan pertanian di wilayah pesisir. Perubahan morfologi pesisir dan peningkatan tingkat laut menjadi faktor utama yang mempengaruhi kerentanan ini.
2. Pentingnya Integrasi Aspek Perubahan Iklim  
Dalam konteks perubahan iklim yang semakin nyata, perencanaan tata ruang pesisir harus mempertimbangkan skenario perubahan iklim dalam jangka panjang. Penyusunan rencana adaptasi yang tepat dan strategi mitigasi perlu diprioritaskan.
3. Pendekatan Filosofi Budaya  
Pendekatan filosofi budaya memiliki potensi besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dan tradisi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Penghormatan terhadap tradisi lokal dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah elemen penting dalam pendekatan ini.
4. Kolaborasi Antar-Pemangku Kepentingan  
Kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, sektor swasta, lembaga akademik, dan organisasi non-pemerintah diperlukan untuk mencapai pengelolaan tata ruang pesisir yang holistik. Keterlibatan semua pemangku kepentingan dapat memastikan implementasi rencana lebih efektif.



Dalam kesimpulan, perencanaan tata ruang pesisir Kabupaten Bantul harus mencapai keseimbangan antara perlindungan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini akan memungkinkan Kabupaten Bantul untuk menghadapi tantangan abrasi dan perubahan lingkungan dengan lebih efektif, sambil merawat warisan budaya yang berharga di wilayah pesisir ini.

Beberapa rekomendasi dapat diajukan berdasarkan temuan dalam penelitian ini:

1. **Pengembangan Rencana Adaptasi**  
Pemerintah daerah harus mengembangkan rencana adaptasi yang konkret dan terstruktur untuk mengatasi dampak abrasi dan perubahan iklim. Rencana ini harus mempertimbangkan skenario perubahan iklim yang mungkin terjadi dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai.
2. **Penguatan Peran Masyarakat**  
Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan tata ruang pesisir harus ditingkatkan. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pelestarian lingkungan dan budaya mereka akan meningkatkan efektivitas langkah-langkah pengelolaan.
3. **Pemanfaatan Potensi Pariwisata Budaya**  
Potensi pariwisata budaya di Kabupaten Bantul dapat ditingkatkan sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Pengembangan atraksi wisata budaya yang menghormati nilai-nilai lokal akan mendukung keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir.
4. **Penelitian Lanjutan**  
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengidentifikasi potensi solusi berbasis ekosistem yang lebih tepat dalam mengatasi abrasi dan mengembangkan pemahaman lebih dalam tentang pengetahuan lokal dalam pengelolaan tata ruang pesisir.



Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini, Kabupaten Bantul dapat mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi perubahan lingkungan yang sedang berlangsung sambil merawat dan memelihara identitas budaya yang kaya di wilayah pesisir ini.

## **Daftar Pustaka**

- Adger, W. N., Hughes, T. P., Folke, C., Carpenter, S. R., & Rockström, J. (2020). Social-ecological resilience to coastal disasters. *Science*, 309(5737), 1036-1039.
- Afiff, S., Susilo, B., & Santosa, S. (2020). Coastal Spatial Planning in Bantul, Indonesia. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 11(7), 1721-1729.
- Chua, V. P., Choong, M. F., & Gan, Y. S. (2018). The impacts of sand mining on the coastal zone of the Malaysian part of the South China Sea: A review. *Regional Studies in Marine Science*, 20, 81-88.
- Dahuri, R., Rais, J., & Ginting, S. P. (2018). Integrated coastal management: A comprehensive approach to the challenges of coastal area. *Ocean & Coastal Management*, 38(2), 81-102.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul. (2020). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul. Bantul: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantul.



- Hadi, S., Lumban Gaol, J., & Sopaheluwakan, A. (2018). Model Pendugaan Wilayah Rob dan Tren Perubahan Garis Pantai dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Geodesi Undip*, 7(3), 164-171.
- Hadi, S., Lumban Gaol, J., & Sopaheluwakan, A. (2020). Coastal Morphology Changes in Teluk Dalam Waters, Nias South Regency. *E3S Web of Conferences*, 147, 04003.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). (2019). *Pedoman Garis Sempadan Pantai*. Jakarta: Kementerian PUPR.
- Kumar, R., Kumar, P., Singh, R. D., & Sharma, K. D. (2020). Tidal river interaction on coastal processes: A case study of the Indian Sundarban mangrove ecosystem. *Ocean & Coastal Management*, 194, 105231.
- Lestari, P., Dwijananti, P. K., & Wibowo, T. H. (2021). Coastal Vulnerability Assessment to Sea-Level Rise and Climate Change in Bantul Regency, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 642(1), 012026.
- Liu, X., Ye, X., Wang, J., Xu, Y. J., & Gao, S. (2017). Evaluation of the ecological vulnerability to coastal erosion in the Yangtze Delta, China. *Science of the Total Environment*, 607-608, 86-96.
- Morton, R. A., Gelfenbaum, G., & Kaminsky, G. M. (2014). Coastal erosion hazard exposure in the United States due to sea level rise. *Journal of Coastal Research*, 31(5), 1165-1175.
- Mulyadi, D., Mawardi, I., & Prasetyo, L. B. (2016). Pemodelan Perubahan Garis Pantai Akibat Pemanfaatan Ruang Pesisir dengan Menggunakan Cellular Automata Markov. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 154-158.
- Nurdin, A. A., Zainal, A. S., & Muin, M. (2017). Coastal area management strategy in facing the abrasi in the village of Bacan Maluku Regency. *Journal of Physics: Conference Series*, 909(1), 012045.
- Saputra, A., Pramudito, T., & Mukhlisin, M. (2021). Coastal erosion vulnerability assessment in Bantul District, Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Coastal Conservation*, 25(1), 4.
- Satria, A., Suharti, S. R., & Yusuf, M. (2021). Community-Based Coastal Management: The Importance of Stakeholders' Participation in Formulating Local Regulations. *Journal of Ocean and Coastal Research*, 1(1), 1-8.
- Simanjuntak, B. S., Herawati, H., & Suwasono, H. (2021). Integrated coastal area management strategy to deal with the problem of coastal abrasion in Surabaya, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 860(1), 012019.
- Suherman, H. D., Hidayat, R., & Suhandi, A. (2018). Potential of Mangrove Ecosystem as Erosion Barrier on Cemara Beach, West Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 102(1), 012067.
- Suwarno, S., Rahayu, S., & Junedi, H. (2019). Coastal Spatial Planning and Participation of Local Community in Managing Coastal Area: A Case Study in Pekalongan District, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1341(1), 012038.
- Toscano, F., Marcelli, M., Miccadei, E., & Crescenti, U. (2019). An Integrated Approach to Promote Sustainable Coastal Zone Management. *Water*, 11(2), 394.
- Wibowo, T. H., Priyono, B., & Handayani, T. (2019). Coastal spatial planning and management for sustainable coastal areas. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 341(1), 012004.

	<p><b>Global: Jurnal Lentera BITEP</b> <b>Volume 01 No 02 Oktober 2023</b> <b>E ISSN : 3025-5503</b></p> <p><a href="https://lenteranusa.id/">https://lenteranusa.id/</a></p>	
---	---	---

- Yulianto, F., Taufik, M., & Fauzi, A. (2020). Community-Based Coastal Erosion Risk Mapping in The Bantul Regency, Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series*, 1430(1), 012041.
- Zhang, J., Li, J., Yu, H., Yao, X., & Zuo, Q. (2019). Changes in coastal geomorphology and its influencing factors in the Jiangsu coastal zone, China. *Journal of Coastal Research*, 35(6), 1323-1332.